

Penegakan HAM dalam perspektif hukum dan keadilan sosial

Miftahul Ulum

Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: ulum39124@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Keadilan Sosial, Indonesia, undang undang

Keywords:

Human Rights, Law Enforcement, Social Justice, Indonesia, Constitution

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang sudah dimiliki setiap orang sejak lahir dan wajib dijaga serta dilindungi oleh negara. Penegakan HAM sangat penting agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penegakan HAM dari sudut pandang hukum serta hubungannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber literatur ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang HAM, dan masih adanya ketimpangan sosial. Karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam sistem hukum, penguatan lembaga yang menangani HAM, serta keterlibatan aktif masyarakat agar keadilan sosial dapat benar-benar terwujud bagi semua.

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental rights that every person possesses from birth and must be protected and upheld by the state. The enforcement of human rights is very important to ensure that social justice can be experienced by all members of society. This study aims to examine the enforcement of human rights from a legal perspective and its relationship with social justice in Indonesia. This research uses a normative legal method, which involves analyzing various laws and regulations as well as academic literature. The results show that the enforcement of human rights in Indonesia still faces many challenges, such as weak law enforcement, low public awareness of human rights, and ongoing social inequality. Therefore, improvements in the legal system are needed, along with strengthening institutions that handle human rights and encouraging active public participation so that social justice can truly be achieved for all.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) itu sebenarnya hal yang sangat sederhana untuk dipahami. Intinya, setiap orang punya hak dasar sejak lahir hanya karena dia manusia. Hak ini tidak boleh dibedakan, entah dia berasal dari suku mana, agamanya apa, kaya atau miskin, semuanya tetap punya hak yang sama. Misalnya, setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan diperlakukan dengan adil. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengarahkan IDENTITAS NASIONAL 7 tindakan dan kebijakan publik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berasal dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara. Secara sederhana, Pancasila sudah mencakup kebutuhan setiap warga negara, baik sebagai individu (pribadi) maupun sebagai makhluk sosial (yang hidup bersama orang lain). Hal ini sesuai dengan kodrat manusia pada umumnya.



Pengakuan terhadap HAM dalam Pancasila terlihat jelas pada sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang menegaskan bahwa setiap manusia harus dihargai, diperlakukan dengan adil, dan dijunjung martabatnya (Mubarak, 2021). Di Indonesia, negara punya peran penting untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka semua hal tentang HAM sudah diatur dalam aturan resmi seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Artinya, negara tidak boleh membiarkan ada orang yang haknya dilanggar. Negara harus hadir untuk melindungi masyarakatnya. Tapi dalam kenyataannya, pelaksanaan HAM tidak selalu berjalan mulus. Kita masih sering melihat masalah di sekitar kita. Contohnya, ada orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, ada yang diperlakukan tidak adil karena latar belakangnya, atau bahkan ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan.

Masalah HAM ini juga tidak bisa dilihat hanya dari sisi hukum saja. Ada faktor lain yang sangat berpengaruh, yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Misalnya, ketika masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan, sulit bagi mereka untuk benar-benar merasakan haknya secara utuh. Begitu juga jika masih ada sikap diskriminasi di masyarakat, maka keadilan akan sulit tercapai. Di sinilah pentingnya keadilan sosial. Keadilan sosial berarti semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup layak, tanpa ada yang tertinggal. Hal ini sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Jadi, bukan hanya soal hukum yang adil, tapi juga bagaimana hasil pembangunan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua orang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke 5 menjadi pedoman bagi kita semua dalam bertindak dan membuat kebijakan publik agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Faslah, 2024). Dengan begitu, pelaksanaan HAM seharusnya tidak hanya berhenti pada aturan tertulis saja. Yang lebih penting adalah bagaimana aturan itu benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan tidak diskriminatif.

Kalau HAM bisa ditegakkan dengan baik dan keadilan sosial benar-benar terwujud, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai, seimbang, dan sejahtera. Semua orang bisa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Itulah tujuan utama dari adanya HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dibuat untuk membahas bagaimana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) jika dilihat dari sisi hukum, serta bagaimana kaitannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Jadi, penelitian ini ingin mengetahui apakah aturan hukum yang ada sudah benar-benar melindungi hak setiap orang dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan di masyarakat.

Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, HAM tidak hanya dilihat sebagai aturan umum dunia, tetapi juga disesuaikan dengan nilai-

nilai Pancasila. Artinya, menghormati HAM bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari sikap moral dan budaya masyarakat Indonesia (Saragih et al., 2024). Secara hukum, Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak aturan untuk melindungi HAM, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 dan berbagai undang-undang lainnya. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan HAM masih menghadapi banyak kendala. Beberapa di antaranya adalah penegakan hukum yang belum maksimal, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM (Irawan, 2024).

Selain itu, penegakan HAM sangat berkaitan dengan keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap orang tidak hanya memiliki hak secara hukum, tetapi juga benar-benar bisa merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya menegakkan HAM harus memperhatikan kondisi nyata masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan budaya (Manalu et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, pembahasan tentang HAM biasanya mencakup beberapa hal penting, seperti pengertian HAM dalam hukum, bagaimana pelaksanaannya di Indonesia, serta berbagai hambatan yang dihadapi. Selain itu, juga dibahas hubungan antara HAM dan keadilan sosial, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan HAM agar masyarakat bisa hidup lebih adil dan sejahtera (Arifin & Lestari, 2019).

Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya gampang dipahami kalau dijelaskan dengan sederhana. Pada dasarnya, setiap orang sudah punya hak sejak dia lahir ke dunia. Hak ini ada bukan karena diberi oleh orang lain, tapi memang sudah melekat pada setiap manusia. Jadi, tanpa perlu meminta atau memperjuangkannya terlebih dulu, setiap orang sebenarnya sudah memiliki hak tersebut. Hak ini juga berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Mau dia kaya atau miskin, tinggal di kota atau di desa, punya jabatan atau tidak, semuanya tetap memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan yang membedakan seseorang hanya karena latar belakangnya. Selain itu, HAM juga tidak bisa diambil begitu saja oleh siapa pun. Artinya, tidak ada pihak yang berhak menghapus atau merampas hak dasar orang lain. Misalnya, setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, berpendapat, mendapatkan pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Hak-hak seperti ini harus dihormati oleh semua orang.

Memahami HAM juga berarti kita sadar bahwa bukan hanya kita yang punya hak, tetapi orang lain juga punya hak yang sama. Jadi, selain menuntut hak kita sendiri, kita juga harus menghargai dan tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, kita bebas berbicara, tapi tetap harus menjaga agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Dengan kata lain, HAM itu seperti aturan dasar dalam kehidupan agar semua orang bisa hidup dengan nyaman, aman, dan saling menghargai. Kalau semua orang bisa memahami dan menerapkannya dengan baik, maka kehidupan di masyarakat akan menjadi lebih adil dan damai.

Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita punya hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan dengan baik oleh orang

lain. Semua orang punya hak yang sama, tidak peduli kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, atau dari latar belakang apa pun. Negara, hukum, dan pemerintah punya tugas untuk melindungi hak-hak tersebut supaya tidak dilanggar. Misalnya, dengan membuat aturan yang adil dan memberikan sanksi jika ada orang yang melanggar hak orang lain. Jadi, hukum itu ada salah satunya untuk menjaga agar HAM tetap dihormati. Intinya, HAM itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya harus tahu hak kita sendiri, tapi juga harus menghormati hak orang lain. Kalau semua orang saling menghargai, maka kehidupan di masyarakat akan lebih aman, nyaman, dan damai.

Di Indonesia, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya sudah punya dasar hukum yang kuat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa aturan yang mengaturnya. Misalnya, dalam UUD 1945 pada Pasal 28A sampai 28J dijelaskan tentang berbagai hak dasar yang dimiliki setiap warga negara. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang secara khusus membahas tentang HAM. Untuk menangani kasus pelanggaran HAM, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tidak hanya itu, Indonesia juga mengakui aturan internasional melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Dari berbagai aturan tersebut, bisa dipahami bahwa negara sudah berusaha memberikan perlindungan terhadap HAM dengan cukup jelas dan terstruktur. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Maksudnya, setiap manusia berhak untuk tetap hidup dan menjaga kehidupannya dengan aman, tanpa ada ancaman dari siapa pun. Hak ini adalah hak paling dasar, karena tanpa adanya kehidupan, manusia tidak bisa menjalankan hak-hak lainnya.

Kemudian, di Pasal 28D dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Artinya, semua orang harus diakui keberadaannya di mata hukum, dilindungi haknya, dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Selain itu, setiap orang juga harus diperlakukan sama di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, atau latar belakang lainnya. Kalau dijelaskan dengan lebih sederhana, hukum di Indonesia itu dibuat supaya semua orang merasa aman dan diperlakukan dengan adil. Tidak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena atau tidak adil hanya karena perbedaan tertentu. Semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Dari sini bisa kita pahami bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk melindungi hak setiap individu agar tidak dilanggar oleh orang lain maupun oleh pihak yang berkuasa.

Menurut Nurcahyani (2024), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan seperti suku, agama, ras, atau status sosial. Jadi, siapa pun orangnya, semuanya punya hak yang sama dan harus dihormati. Kalau dilihat dari sisi hukum di Indonesia, HAM itu jadi dasar penting dalam membuat aturan dan menjalankan hukum. Artinya, setiap kebijakan yang dibuat oleh negara seharusnya tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat. Perlindungan terhadap HAM juga bisa dijadikan ukuran untuk melihat apakah suatu negara sudah menjalankan sistem demokrasi dengan baik atau belum. Selain itu, dari

situ juga bisa dilihat apakah masyarakatnya sudah hidup sejahtera atau belum. Karena itu, penegakan HAM harus dilakukan secara serius dan terus-menerus. Tujuannya supaya tidak ada pihak, termasuk pemerintah atau aparat hukum, yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan Masyarakat (Nurchayani, 2024). Selain itu, Suhardin (2009) menjelaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan sosial harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Suhardin juga menekankan bahwa seringkali penegakan hukum di Indonesia masih belum mencerminkan keadilan sosial karena adanya kesenjangan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan (Suhardin, 2009).

Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga penting, seperti:

- Komnas HAM → tugasnya menerima laporan dan menyelidiki kasus pelanggaran HAM
- Pengadilan HAM → tempat mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat
- Mahkamah Konstitusi → menguji undang-undang agar tidak melanggar HAM
- Kepolisian → menyelidiki dan menangani kasus
- Kejaksaan → menuntut pelaku ke pengadilan

Tapi dalam kenyataannya, penegakan HAM di Indonesia masih punya beberapa masalah.

1. Lemahnya Penegakan Hukum

Masalah utama adalah hukum yang belum ditegakkan dengan baik. Kadang hukum tidak dijalankan secara tegas dan adil. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak selesai atau tidak jelas ujungnya. Hal ini membuat masyarakat jadi kurang percaya dengan lembaga hukum yang ada. Menurut Hutabarat (2022), lemahnya sistem hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya independensi lembaga penegak hukum, adanya intervensi politik, serta ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap masyarakat. Hutabarat menjelaskan bahwa praktik penegakan hukum yang tidak adil dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM karena masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Kondisi ini juga menyebabkan hukum cenderung berpihak pada kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi (Hutabarat, 2022).

Selain itu, Firmansyah dan Pangestika (2024) juga menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan rentan kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kasus pelanggaran HAM yang tidak ditangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum (Firmansyah & Pangestika, 2024).

2. Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Perbedaan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan layanan publik menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan haknya secara adil. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial dan pelanggaran HAM. Menurut Hesty dkk. (2025), ketimpangan sosial menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan rentan lebih mudah mengalami pelanggaran HAM karena keterbatasan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum (Hesty et al., 2025). Selain itu, Mustikasari menjelaskan bahwa ketimpangan sosial menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat dan memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya terhadap kelompok marginal (Mustikasari, 2024).

3. Kurangnya Kesadaran HAM

Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai HAM juga menjadi hambatan dalam penegakan HAM. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya sehingga tidak menyadari ketika terjadi pelanggaran. Menurut Manalu dkk (2024), rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM menyebabkan masyarakat tidak mengetahui cara memperjuangkan haknya secara hukum (Manalu et al., 2024). Selain itu, Anandhea dkk. (2025) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai HAM menjadi faktor utama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak asasi manusia (Anandhea et al., 2025).

Penegakan HAM dalam Perspektif Keadilan Sosial

Keadilan sosial menjadi tujuan penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Artinya, hukum harus diberlakukan dengan adil kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun keadaan ekonomi seseorang. Hal ini penting karena setiap manusia sejak lahir memiliki hak yang sama. Jika HAM ditegakkan dengan baik, masyarakat akan merasa lebih aman, terlindungi, dan lebih percaya kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penegakan HAM juga membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih damai, rukun, dan saling menghargai (Suparman Marzuki & Eko Riyadi, 2017).

Selain itu, penegakan HAM juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Artinya, hukum hadir supaya setiap orang tidak diperlakukan semena-mena dan bisa hidup dengan aman. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua warga mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Jadi, siapa pun harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa ada perbedaan. Penegakan HAM bukan hanya untuk menghukum orang yang bersalah, tapi juga untuk menjaga agar hak-hak masyarakat tetap aman dan tidak dilanggar. Dengan begitu, masyarakat bisa merasa lebih tenang karena haknya dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan HAM sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena kalau hak setiap orang dijaga, kehidupan akan terasa lebih aman, adil, dan nyaman untuk semua (Suparman Marzuki & Eko Riyadi, 2017).

Menurut Ruslan Renggong (2021), konsep keadilan sosial dalam penegakan HAM berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan hak secara menyeluruh. Artinya, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama

dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Penegakan HAM harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang terlalu besar (Ruslan Renggong, 2021). Penegakan HAM yang baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika hak masyarakat dilindungi, maka masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan aman. Selain itu, perlindungan HAM juga dapat mengurangi konflik sosial yang sering terjadi akibat ketidakadilan. Oleh karena itu, penegakan HAM sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Ruslan Renggong, 2021).

Dalam perspektif keadilan sosial, penegakan HAM tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelanggar, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Kelompok rentan ini sering mengalami diskriminasi dan pelanggaran HAM sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah (Suyahman, 2024). Selain itu, penegakan HAM juga harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Transparansi penting agar masyarakat dapat mengawasi proses penegakan hukum. Jika penegakan HAM dilakukan secara terbuka dan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini akan membantu menciptakan stabilitas sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Mochamad Syaiful Suyahman, 2024)..

Upaya Meningkatkan Penegakan HAM

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan HAM antara lain sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Hukum

Reformasi sistem hukum sangat penting untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia. Reformasi hukum dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, serta memperbaiki sistem peradilan agar lebih transparan dan adil. Dengan adanya reformasi hukum, pelanggaran HAM dapat diminimalkan dan masyarakat dapat memperoleh keadilan yang lebih baik (Citra Sari Pratiwi & Fajar Ramadhan, 2023).

Reformasi hukum juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus diberikan pelatihan mengenai HAM agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak melakukan pelanggaran HAM (Citra Sari Pratiwi & Fajar Ramadhan, 2023). Pelanggaran HAM sudah sering terjadi di Indonesia, pada masa pemerintahan orde lama bahkan sampai era reformasi kini masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran tersebut termasuk dalam perkara pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan sampai saat ini. Tidak terselesainya pelanggaran HAM tersebut maka itu termasuk sebuah ketidakadilan dan membuat penderitaan bagi korban serta keluarganya (Huda et al., 2022).

Berikut salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini belum terungkap jelas adalah, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004 juga menjadi sorotan. Munir dikenal sebagai pejuang HAM yang vokal, dan ia meninggal akibat diracun saat dalam perjalanan ke luar negeri. Walaupun ada pelaku yang telah dihukum, namun hingga kini masih banyak yang percaya bahwa dalang utama di balik pembunuhan tersebut belum berhasil diungkap secara tuntas. Dari kasus inilah menjadi bukti bahwa di Indonesia masih banyak pelanggaran HAM yang belum terungkap secara jelas kebenarannya.

2. Penguatan Lembaga Penegak HAM

Lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM harus diperkuat agar dapat menangani kasus pelanggaran HAM secara efektif. Penguatan lembaga dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran, sumber daya manusia, serta kewenangan lembaga tersebut. Dengan lembaga yang kuat, penegakan HAM dapat dilakukan secara lebih cepat dan adil (Rico Setyo Nugroho, 2025). Selain itu, koordinasi antar lembaga juga perlu ditingkatkan agar penanganan kasus pelanggaran HAM dapat berjalan dengan baik. Jika lembaga penegak HAM bekerja secara optimal, maka perlindungan terhadap masyarakat juga akan meningkat (Rico Setyo Nugroho, 2025).

3. Pendidikan HAM kepada Masyarakat

Pendidikan HAM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Pendidikan HAM dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, media sosial, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya pendidikan HAM, masyarakat dapat memahami pentingnya menghormati hak orang lain (Rizky Kurniawan Putra, 2024). Selain itu, pendidikan HAM juga dapat membantu masyarakat mengetahui cara melaporkan pelanggaran HAM. Jika masyarakat memahami HAM dengan baik, maka pelanggaran HAM dapat dikurangi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis (Rizky Kurniawan Putra, 2024).

4. Peningkatan Transparansi Pemerintah

Transparansi pemerintah sangat penting dalam penegakan HAM. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengawasi kebijakan pemerintah. Transparansi juga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Selain itu, transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat percaya terhadap pemerintah, maka stabilitas sosial akan terjaga dengan baik (Zulkarnain Helen, 2020).

5. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin membutuhkan perlindungan khusus. Pemerintah harus memastikan kelompok rentan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan demikian, keadilan sosial dapat tercapai secara merata (Suparman Marzuki, 2017)

Perlindungan kelompok rentan juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Jika kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang baik, maka kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat (Suparman Marzuki, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Penegakan HAM dalam perspektif hukum dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi terkait HAM, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan penegakan HAM serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anandhea, Q., Dzatirrajwa, H., & Auly, S.N. (2025). *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Hukum Causa, Repository: <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/2302>
- Faslah, Romi. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. UIN Maliki Press. Kota Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Fathanudien, A. (2024). *Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Keadilan Konstitusional*. Artikel Ilmiah. ResearchGate Repository. <https://www.researchgate.net/publication/399912672>
- Firmansyah, D.D., & Pangestika, E.Q. (2024). *Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Repository: <http://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/67>
- Fitroh, A.S. (2026). *Reformasi Sistem Penegakan Hukum untuk Melindungi Hak Perempuan*. Jurnal Ilmiah. Repository Unimugo. <http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/2091>
- Hesty, A., Oktavia, A., Anggun, C., & Huda, D. (2025). *Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Pemikiran Politik dan Hukum, Repository: <https://journal.ciraja.com/index.php/JPPIP/article/view/106>
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). *Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>
- Hutabarat, N.R. (2022). *Politik Hukum Presidential Threshold: Studi Komprehensif Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Iswandi, I. (2026). *Implementasi Pemenuhan Hak Warga Binaan*. Karya Ilmiah. Repository UIN Palopo <https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/12236/>
- Margono, Rudi. (2026). *Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal*. Buku. Google Books. https://books.google.com/books?id=_CO2EQAAQBAJ

- Mubarak, A. (2021). Aksesibilitas pusat perbelanjaan di Kota Malang bagi penyandang disabilitas dalam perspektif HAM. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/789>
- Mustikasari, F. (2024). *Analisis Peran Konstitusi dalam Menjamin HAM dan Keadilan Sosial*. Media Hukum Indonesia Repository: <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/654>
- Nurchayani, D. (2024). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol. 2 No. 1. <https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/210>
- Ramelan, R., Asnawi, A., & Wiwik, M. (2026). Reformasi Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah*. Repository LPPM Unsaka. <https://ejournal.lppmunsaka.ac.id/index.php/lexgnosis/article/view/29>
- Saputra, R.H. (2026). Analisis Yuridis Penegakan HAM di Indonesia. *Karya Ilmiah*. Repository UKI. <http://repository.uki.ac.id/21685>
- Suhardin, Y. (2009). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Sosial dan Berdimensi HAM (Studi terhadap Penggusuran Kelompok Masyarakat Marginal)*. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 16 No. 1
- Wahyudhi, D. (2026). Politik Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial. *Karya Ilmiah*. Repository Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/90265/>
- Widyaningsih, R. (2024). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan. *Karya Ilmiah*. Repository UNISSULA. <https://repository.unissula.ac.id/35561/>